

**BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2022**



**TINJAUAN CAPAIAN DIMENSI D
JENJANG SEKOLAH DASAR
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
TAHUN 2021**

**DISUSUN OLEH:
TENDAS TEDDY SOESILO
NIP. 197801272002121001**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
TAHUN 2022**

Lembar Pengesahan

Kegiatan : Penyusunan Buku Tinjauan Capaian Dimensi D
Jenjang Sekolah Dasar Kabupaten Penajam Paser
Utara Tahun 2021

Sasaran : Rapor Pendidikan Jenjang SD kabupaten Penajam
Paser utara

Waktu Pelaksanaan : November 2022

Penulis : Tendas Teddy Soesilo, S. Pd.

NIP : 197801272002121001

Jabatan : Widyaprada Ahli Muda

Samarinda, November 2022

Kepada
BPMP Provinsi Kalimantan Timur,



Dr. Khairullah, S.Pd., M.Pd.
NIP. 197002011997021001

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji Syukur Alhamdulillah senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanawata'ala Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan buku "Tinjauan Capaian Dimensi D Jenjang Sekolah Dasar Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021" ini. Buku ini berisi tentang tinjauan capaian kualitas dalam proses pembelajaran (Dimensi D) berdasarkan hasil Rapor Pendidikan yang dikeluarkan oleh kementerian pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi, pada tahun 2022 hasil Asesmen tahun 2021.

Makalah yang berjudul "Tinjauan Capaian Dimensi D Jenjang Sekolah Dasar Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021" ini dibuat dalam rangka melaksanakan kegiatan pengembangan profesi dalam menunjang tugas penulis sebagai Widyaprada. Tidak lupa penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Khairullah, M.Pd. selaku kepala BPMP Provinsi Kalimantan Timur yang telah memberikan motivasi untuk menyelesaikan makalah ini.
2. Bapak Abdul Sokib Zunaidi, S.Si, M.Si. selaku kepala Sub Bagian Umum dan Rekan-rekan Pejabat Fungsional Widyaprada dan semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian makalah ini.

Penulis juga menyadari sebagai manusia biasa tentunya tulisan ini masih perlu perbaikan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritikan dan masukan demi perbaikan tulisan ini dikemudian hari. Harapan penulis, semoga makalah ini dapat bermanfaat serta menambah wawasan pengetahuan tentang Rapor Pendidikan bagi kita semua, Aamiin ya Robbal "Aalamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Lembar Keaslian	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	v
Daftar Tabel.....	vii
Daftar Gambar.....	viii
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan Penulisan.....	4
C. Sasaran.....	5
D. Keluaran.....	5
E. Ruang Lingkup / Batasan	5
BAB II Kajian Pustaka	6
A. Mutu Pendidikan.....	6
B. Penjaminan Mutu Pendidikan	14
C. Rapor Pendidikan	17
D. Kerangka Berpikir	21
BAB III Metodologi Penulisan	23
A. Pendekatan Penelitian.....	23
B. Teknik Pengumpulan Data	23

C. Teknik Pengolahan dan Analisa Data	23
BAB IV Hasil Analisis dan Pembahasan	24
A. Hasil Analisis pada Dimensi D	24
1. Capaian Literasi Rapor Pendidikan Tahun 2021	24
2. Capaian Numerasi Rapor Pendidikan Tahun 2021.....	26
3. Capaian Karakter Rapor Pendidikan Tahun 2021	28
4. Capaian Iklim Keamanan Sekolah Rapor Pendidikan Tahun 2021	29
5. Capaian Iklim Kebhinekaan Rapor Pendidikan Tahun 2021.....	31
6. Capaian Iklim Inklusivitas Rapor Pendidikan Tahun 2021	33
B. Dimensi D sebagai Indikator Pelaksanaan Proses Pembelajaran.....	32
1. Kualitas Pembelajaran	32
2. Refleksi dan Perbaikan Pembelajaran oleh Guru Numerasi	33
3. Kepemimpinan Instruksional	33
4. Iklim Keramanan Sekolah	35
5. Iklim Kebinekaan.....	37
6. Iklim Inklusivitas	37
BAB V Kesimpulan dan Saran	38
A. Kesimpulan	38
B. Saran	38
Daftar Pustaka.....	39

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Agregasi Capaian Dimensi D	21
---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Profil Pendidikan	20
Gambar 2. Agregasi Capaian Kualitas Pembelajaran	22
Gambar 3. Agregasi Capaian Refleksi dan Perbaikan Pembelajaran Oleh Guru	24
Gambar 4. Agregasi Capaian Kepemimpinan Intruksional	25
Gambar 5. Iklim Keamanan Sekolah	27
Gambar 6. Agregasi Capaian Iklim Kebinekaan.....	29
Gambar 7. Agregasi Capaian Iklim Inklusivitas	31

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, yaitu untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah No.57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan pengganti yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022. Mutu pendidikan dasar dan menengah adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) di sekolah. Mutu pendidikan di sekolah cenderung tidak ada peningkatan tanpa diiringi dengan penjaminan mutu pendidikan yang dilakukan oleh pihak sekolah sendiri (pihak internal) dan pihak lain di luar sekolah sesuai kewenangannya (pihak eksternal). Penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah sendiri merupakan mekanisme yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pendidikan telah sesuai dengan standar mutu dan aturan yang ditetapkan.

Peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan ini merupakan tanggung jawab dari setiap komponen di satuan pendidikan. Sesuai peraturan perundangan yakni permendikbud 28 tahun 2016 fungsi dan tujuan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah berfungsi untuk mengendalikan penyelenggaraan pendidikan oleh satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah sehingga terwujud pendidikan yang bermutu. Peningkatan mutu di satuan pendidikan tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya budaya mutu

pada seluruh komponen sekolah. Untuk peningkatan mutu sekolah secara utuh dibutuhkan pendekatan khusus agar seluruh komponen sekolah bersama-sama memiliki budaya mutu. Untuk itu dibutuhkan program Implementasi Penjaminan Mutu Pendidikan di seluruh sekolah di Indonesia dengan pendekatan pelibatan seluruh komponen sekolah (*whole school approach*).

Sebagai langkah awal rangkaian kegiatan penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan, setiap satuan pendidikan harus mampu melakukan penyusunan peta mutu. Penyusunan peta mutu ini diperlukan agar setiap satuan pendidikan dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan masing-masing berkaitan dengan pencapaian Standar Nasional Pendidikan, sehingga dapat dilakukan perbaikan untuk mencapai dan bahkan melampaui Standar Nasional Pendidikan. Dalam konsep Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP), peningkatan mutu pendidikan harus dilaksanakan dengan berbasis data yang telah dianalisis dengan akurat dan benar. Analisis data ini kemudian menghasilkan rekomendasi yang dapat digunakan sebagai base-line data untuk dasar merencanakan kegiatan dan program peningkatan mutu secara proporsional, akurat, dan berkelanjutan. Sekolah/Madrasah adalah pelaku utama dalam proses penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan di tingkat satuan pendidikan.

Hasil pemetaan mutu pendidikan tersebut selanjutnya akan dianalisis untuk dapat menghasilkan peta mutu dan rekomendasi program peningkatan mutu yang tepat sebagai upaya pemenuhan 8 (delapan) SNP di tingkat sekolah. Berbagai rekomendasi yang dirumuskan berdasarkan hasil analisis pemetaan mutu pendidikan kemudian perlu dituangkan ke dalam Rencana Kerja Sekolah (RKS), untuk jangka waktu menengah, dan RKAS (Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah) yang merupakan jangka pendek setiap tahun. Pemetaan mutu pendidikan diverifikasi oleh Pengawas Sekolah selaku pembina sekolah tersebut. Kegiatan agregasi

dan analisis pemetaan mutu pendidikan dilakukan untuk mendapatkan peta tentang capaian 8 (delapan) SNP. Dari hasil analisis ini akan didapat gambaran tentang tahapan pengembangan setiap indikator dari setiap SNP untuk setiap jenjang pendidikan.

Rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan, salah satunya pada jenjang pendidikan dasar, merupakan salah satu masalah yang dihadapi bangsa Indonesia. Mutu dalam Pendidikan suatu hal yang membedakan antara kesuksesan dan kegagalan. Sehingga mutu merupakan persoalan yang akan menjamin perkembangan sekolah dalam meraih status di tengah-tengah persaingan dalam dunia Pendidikan. Mutu pendidikan dasar dan menengah adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) di sekolah. Mutu pendidikan di sekolah cenderung tidak ada peningkatan tanpa diiringi dengan penjaminan mutu pendidikan yang dilakukan oleh pihak sekolah sendiri (pihak internal) dan pihak lain di luar sekolah sesuai kewenangannya (pihak eksternal). Penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah sendiri merupakan mekanisme yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pendidikan telah sesuai dengan standarmutu dan aturan yang ditetapkan.

Penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah merupakan kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses terpadu yang mengatur segala kegiatan untuk meningkatkan mutu secara sistematis, terencana dan berkelanjutan. bertujuan memastikan pemenuhan standar pada satuan pendidikan secara sistemik, holistik, dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu pada satuan pendidikan secara mandiri. berfungsi sebagai pengendali penyelenggaraan pendidikan oleh satuan pendidikan untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu.

Sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah terdiri atas:

Sistem penjaminan mutu internal (SPMI) yang dilaksanakan dalam satuan pendidikan dan dijalankan oleh seluruh komponen satuan pendidikan dan Sistem penjaminan mutu eksternal (SPME) yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, lembaga akreditasi dan lembaga standarisasi pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang telah ditetapkan sebagai kriteria minimal yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan dan penyelenggara pendidikan. Standar Nasional Pendidikan terdiri atas 8 standar, yakni: Standar Kompetensi Lulusan, (2) Standar Isi, (3) Standar Proses, Standar Penilaian, (5) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, (6) Standar Sarana dan Prasarana, (7) Standar Pengelolaan, dan (8) Standar Pembiayaan.

Kedelapan standar tersebut membentuk rangkaian *input*, proses, dan *output*. Standar Kompetensi Lulusan merupakan *output* dalam rangkaian tersebut dan akan terpenuhi apabila input terpenuhi sepenuhnya dan proses berjalan dengan baik. Standar yang menjadi input dan proses dideskripsikan dalam bentuk hubungan sebab-akibat dengan output. Untuk mempermudah kegiatan pemetaan mutu dalam penjaminan mutu pendidikan, baik dalam SPMI maupun SPME, selanjutnya kedelapan Standar Nasional Pendidikan tersebut telah dijabarkan dalam bentuk indikator dan sub indikator mutu. Kebijakan merdeka belajar episode ke 19 terdapat perbaikan guna mewujudkan transformasi satuan pendidikan, yakni tentang Rapor Pendidikan dan Perencanaan berbasis data.

B. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memberikan tinjauan hasil Rapor Pendidikan pada Dimensi D dalam memperkuat SPMP jenjang Sekolah Dasar (SD) di kabupaten Penajam Paser Utara. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis capaian Rapor Pendidikan tahun 2021 jenjang Sekolah Dasar.
2. Memberikan tinjauan kebijakan kepada pemerintah daerah sesuai dengan capaian Rapor Pendidikannya khususnya pada Dimensi D.

C. Sasaran

Dalam kajian ini yang menjadi sasaran adalah rapor pendidikan hasil asesmen tahun 2021 yang keluar hasilnya dirilis oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi pada tahun 2022 pada jenjang Sekolah Dasar kabupaten Penajam Paser Utara.

D. Keluaran

Keluaran dari tinjauann ini adalah laporan hasil kajian yang meliputi hasil analisis rapor pendidikan, rekomendasi kebijakan atau kegiatan dalam pemenuhan standar nasional pendidikan

E. Ruang Lingkup/Batasan

Ruang lingkup/batasan kajian ini adalah Dimensi D Rapor Pendidikan tahun 2021 pada jenjang Sekolah Dasar kabupaten Penajam Paser Utara.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Mutu Pendidikan

Mutu Menurut bahasa mutu berarti kualitas, tingkat, derajat, kadar. Sebagai suatu konsep, mutu seringkali ditafsirkan dengan beragam definisi, bergantung kepada pihak dan sudut pandang mana konsep itu di persepsikan. Dalam dunia pendidikan, dua pertanyaan pokok yang penting dikemukakan adalah apa yang dihasilkan dan siapa pemakai pendidikan. Pengertian tersebut merujuk kepada nilai tambah yang diberikan oleh pendidikan dan pihak-pihak yang memproses serta menikmati hasil-hasil pendidikan.

Pendidikan adalah Suatu lembaga yang menangani masalah proses sosialisasi, yang intinya mengantarkan seseorang pada kebudayaan. Sedangkan menurut Prof. H.M. Arifin, merupakan proses budaya untuk meningkatkan kualitas dan martabat manusia sepanjang hayat, yang dilaksanakan di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. Sedangkan mutu pendidikan adalah kemampuan sistem pendidikan, baik dari segi pengelolaan maupun dari segi proses pendidikan itu sendiri, di arahkan secara efektif untuk meningkatkan nilai tambah dari faktor-faktor input (besarnya kelas sekolah, guru, buku pelajaran, situasi belajar dan kurikulum, manajemen sekolah, keluarga) agar menghasilkan out-put setinggi-tingginya.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “mutu” berarti ukuran baik buruknya sesuatu, kualitas, taraf atau derajat (kepandaian, kecerdasan). Mutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan. Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mencakup input, proses dan output pendidikan. Menurut Rusman, antara proses dan hasil pendidikan yang bermutu saling berhubungan. Akan tetapi, agar proses

yang baik itu tidak salah arah, maka mutu dalam dalam artian hasil (output) harus dirumuskan lebih dahulu oleh sekolah, dan harus jelas target yang akan dicapai setiap tahun atau kurun waktu lainnya.

Istilah mutu atau kualitas yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu *quality*, dalam kamus *the standard of something when it is compared to other things like it* (Oxford University Press, 2010:1198), memberikan arti bahwa kualitas adalah suatu standar atau ukuran dari sesuatu ketika dibandingkan dengan hal lain yang sama. Berdasarkan istilah tersebut, dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mengacu pada masukan, proses, luaran, dan dampaknya. Mutu masukan dapat dilihat dari beberapa sisi, yaitu: (Sudarwan, 2008: 53).

1. Memiliki kondisi baik atau tidaknya masukan sumber daya manusia seperti kepala sekolah, guru, laboran, staf tata usaha, dan siswa.
2. Memenuhi atau tidaknya kriteria masukan material berupa alat peraga, buku-buku, kurikulum, prasarana, sarana sekolah, dan lain-lain.
3. Memenuhi atau tidaknya kriteria masukan yang berupa perangkat lunak, seperti peraturan, struktur organisasi, dan deskripsi kerja.
4. Memiliki mutu masukan yang bersifat harapan dan kebutuhan, seperti visi, motivasi, ketekunan, dan cita-cita.
5. Hasil pendidikan dipandang bermutu jika mampu melahirkan keunggulan akademik dan ekstrakurikuler pada peserta didik yang dinyatakan lulus untuk satu jenjang pendidikan atau menyelesaikan program pembelajaran tertentu.

Hakikatnya, mutu di bidang pendidikan meliputi mutu input, proses, output, dan outcome. Input pendidikan dinyatakan bermutu jika siap berproses. Proses pendidikan bermutu apabila mampu menciptakan suasana yang PAIKEMB (Pembelajaran yang Aktif, Inovatif, Kreatif, Menyenangkan, dan Bermakna). Output, dinyatakan bermutu jika hasil belajar akademik dan non akademik siswa tinggi. Outcome, dinyatakan

bermutu apabila lulusan cepat terserap di dunia kerja, gaji wajar, semua pihak mengakui kehebatan lulusan dan merasa puas (Usman, 2009:513). Sedangkan Mutu pendidikan menurut Permendiknas Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan adalah tingkat kecerdasan kehidupan bangsa yang dapat diraih dari penerapan SNP.

Pengertian mutu yang mencakup input, proses, dan atau output pendidikan, menurut Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas, 2001: 24), adalah bahwa mutu dalam konteks “hasil pendidikan” mengacu pada prestasi yang dicapai oleh sekolah pada setiap kurun waktu tertentu. Prestasi yang dicapai atau hasil pendidikan (student achievement) dapat berupa hasil tes kemampuan akademis. Dapat pula prestasi di bidang lain, seperti prestasi di cabang olahraga, seni, keterampilan, dan lain- lain. Bahkan, prestasi sekolah dapat berupa kondisi yang tidak dapat dipegang (intangible), seperti suasana disiplin, keakraban, saling menghormati, kebersihan, dan sebagainya (Sowiyah, 2010: 24).

Berdasarkan hal tersebut, pengertian mutu dalam konteks pendidikan mengacu pada proses pendidikan dan hasil pendidikan. Proses pendidikan yang bermutu melibatkan berbagai input seperti bahan ajar, metode pembelajaran, sarana sekolah, dukungan administrasi, dan sarana prasarana serta sumber daya lainnya untuk menciptakan suasana sekolah yang kondusif. Mutu dalam pendidikan untuk menjamin kualitas input, proses, produk/output, dan outcome sekolah sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas sekolah. Input pendidikan dinyatakan bermutu jika siap diproses, masalah mutu harus menjadi perhatian termasuk dalam bidang pendidikan. Oleh karena itu, masalah mutu dalam dunia pendidikan harus menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, sekolah dan masyarakat. Mengingat masih diperlukan upaya yang serius guna meningkatkan mutu pendidikan serta persaingan global dalam bidang pendidikan yang menunjukkan kecenderungan makin meningkat dengan baik. Output dinyatakan bermutu jika hasil belajar akademik dan non

akademik peserta didik tinggi. Outcome dinyatakan bermutu apabila lulusan cepat terserap di dunia kerja, gaji wajar atau sesuai, dan semua pihak mengakui kehebatan lulusan dan merasa puas dengan kompetensi yang dimiliki oleh lulusan (Usman, 2006: 41).

Pendidikan yang bermutu bukan sesuatu yang terjadi dengan sendirinya, hal itu merupakan hasil dari suatu proses pendidikan berjalan dengan baik, efektif dan efisien. Menurut Arcaro (2005, 85), mutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mencakup input, proses dan output pendidikan. Suryadi dan Tilaar (1995, 108) menjelaskan bahwa mutu pendidikan merupakan kemampuan sistem pendidikan yang diarahkan secara efektif untuk meningkatkan nilai tambah faktor input agar menghasilkan output yang setinggi-tingginya.

1. Karakteristik Mutu

Karakteristik mutu di dunia pendidikan, menurut Usman (2011: 79-82) menyebutkan bahwa mutu pendidikan memiliki 13 karakteristik yaitu:

- 1) Kinerja (Performance), berkaitan dengan aspek fungsional sekolah. Misalnya, kinerja guru dalam mengajar baik, memberikan penjelasan yang meyakinkan, sehat dan rajin mengajar, dan menyiapkan bahan pelajaran yang lengkap. Pelayanan administratif dan edukatif baik yang ditandai oleh hasil belajar yang tinggi, lulusan banyak, putus sekolah sedikit, lulus tepat waktu banyak.
- 2) Waktu wajar (timeliness), selesai dengan waktu yang wajar. Misalnya, guru memulai dan mengakhiri pelajaran tepat waktu, batas waktu pemberian pekerjaan rumah wajar, waktu untuk naik pangkat wajar.
- 3) Handal (reability), misalnya, pelayanan prima yang diberikan sekolah bertahan dari tahun ke tahun, guru bekerja dari tahun ke tahun.
- 4) Daya tahan (durability), misalnya, meskipun krisis moneter, sekolah

masih tetap bertahan, siswa dan guru tidak putus asa dan selalu sehat.

- 5) Indah (*aesthetics*), misalnya, interior dan eksterior sekolah ditata dengan baik, taman yang ditanami bunga yang menarik dan terpelihara dengan baik, guru membuat media pendidikan yang menarik, warga sekolah berpenampilan rapi.
- 6) Hubungan manusia (*personal interface*), menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan profesionalisme.
- 7) Mudah penggunaannya (*easy of use*), sarana prasarana dipakai. Misalnya, aturan-aturan mudah diterapkan. Buku perpustakaan mudah dipinjam dan dikembalikan tepat waktu serta penjelasan guru di kelas mudah dimengerti siswa.
- 8) Bentuk khusus (*feature*), keunggulan tertentu. Misalnya, ada sekolah yang unggul dengan kegiatan ekstrakurikuler nya.
- 9) Standar tertentu (*conformance to specification*), memenuhi standar tertentu. Misalnya, sekolah sudah terakreditasi dan mencapai nilai akreditasi A (amat baik), sekolah sudah memenuhi standar minimal ujian nasional.
- 10) Konsistensi (*consistency*), keajekan, konstan, stabil. Misalnya, mutu sekolah dari dulu sampai sekarang.
- 11) Seragam (*uniform*), tanpa variasi, tidak tercampur. Misalnya, sekolah menyeragamkan pakaian sekolah dan pakaian dinas. Sekolah melaksanakan aturan, tidak pandang bulu atau pilih kasih.
- 12) Mampu melayani (*serviceability*): mampu memberikan pelayanan prima. Misalnya, sekolah menyediakan kotak saran dan saran-saran yang masuk mampu dipenuhi dengan sebaik-baiknya. Sekolah mampu memberikan pelayanan sehingga semua pelanggan merasa puas.
- 13) Ketetapan (*accuracy*): ketetapan dalam pelayanan. Misalnya, sekolah mampu memberikan pelayanan sesuai dengan yang diinginkan

pelanggan sekolah.

2. Syarat Mutu

Untuk memperoleh mutu yang baik sebagaimana yang telah di definisikan di atas, mutu harus memiliki syarat-syarat. Menurut Sudarwan (2008: 53) yang mendefinisikan mutu sebagai konteks, persepsi, customer, dan kebutuhan serta kemauan customer harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Kepemimpinan puncak tidak hanya berkewajiban untuk menentukan kebutuhan customer pada saat sekarang melainkan juga harus mengantisipasi kebutuhan customer yang akan datang.
- 2) Mutu ditentukan oleh customer
- 3) Perlu dikembangkan ukuran-ukuran untuk memiliki efektivitas upaya guna memenuhi kebutuhan customer melalui karakteristik mutu.
- 4) Kebutuhan dan kemauan customer harus diperhitungkan dalam desain produk atau jasa.
- 5) Kepuasan customer merupakan syarat yang perlu bagi mutu dan selalu jadi tujuan proses untuk menghasilkan produk atau jasa.

Pendidikan yang bermutu bukan sesuatu yang terjadi dengan sendirinya, merupakan hasil dari suatu proses pendidikan yang berjalan dengan baik, efektif dan efisien. Menurut Arcaro (2005, 85), mutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mencakup input, proses dan output pendidikan. Suryadi dan Tilaar (1995, 108) menjelaskan bahwa mutu pendidikan adalah merupakan kemampuan sistem pendidikan yang diarahkan secara efektif untuk meningkatkan nilai tambah faktor input agar menghasilkan output yang setinggi-tingginya.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Mutu Pendidikan

Rendahnya mutu pendidikan menurut Deming secara umum disebabkan oleh beberapa sumber yang mencakup desain kurikulum yang lemah, bangunan yang tidak memenuhi syarat, lingkungan kerja yang buruk, sistem dan prosedur yang tidak sesuai, jadwal kerja yang serampangan, sumber daya yang kurang, dan pengembangan staf yang tidak memadai. Sebab-sebab khusus masalah mutu bisa mencakup kurangnya motivasi, kegagalan komunikasi, atau masalah yang berkaitan dengan perlengkapan (Sallis, 2006:103).

Upaya peningkatan mutu dan perluasan pendidikan membutuhkan sekurang-kurangnya tiga faktor utama, yaitu: (1) kecukupan sumber-sumber pendidikan dalam arti kualitas tenaga kependidikan, biaya dan sarana belajar; (2) mutu proses belajar mengajar yang mendorong siswa belajar efektif; dan (3) mutu keluaran dalam bentuk pengetahuan, sikap keterampilan, dan nilai-nilai. Jadi kecukupan sumber, mutu proses belajar mengajar, dan mutu keluaran akan dapat terpenuhi jika dukungan biaya yang dibutuhkan dan tenaga profesional kependidikan dapat disediakan di sekolah (Fattah, 2009: 90).

Pandangan masyarakat secara sempit atau khusus, faktor dominan yang berpengaruh dan berkontribusi besar terhadap mutu pendidikan adalah guru yang profesional dan guru yang sejahtera. Oleh karena itu, guru harus secara profesional melaksanakan tugasnya dalam proses pembelajaran, pembimbingan dan pelatihan terhadap peserta didik agar berkompeten. Pelaku-pelaku dunia pendidikan menyadari keharusan mereka untuk meraih mutu tersebut dan menyampaikannya pada pelajar dan anak didik. Sesungguhnya, ada banyak sumber mutu dalam pendidikan, misalnya sarana gedung yang bagus, guru yang terkemuka, nilai moral yang tinggi, hasil ujian yang memuaskan, spesialisasi atau kejuruan, dorongan orang tua, bisnis, dan komunitas lokal, sumber daya yang melimpah, aplikasi teknologi mutakhir, kepemimpinan yang baik dan efektif, perhatian terhadap pelajar dan anak didik, kurikulum yang

memadai, atau juga kombinasi dari faktor-faktor tersebut.

Mutu pendidikan tidak hanya ditentukan oleh sekolah sebagai lembaga pengajaran, melainkan juga disesuaikan dengan apa yang menjadi pandangan dan harapan masyarakat yang cenderung selalu berkembang seiring dengan kemajuan zaman. Menurut Sagala (2010: 35), sekolah yang berhasil dalam meningkatkan mutu pendidikannya ditentukan oleh faktor-faktor antara lain: (1) perumusan visi, misi dan tujuan sekolah, (2) evaluasi diri sekolah, (3) peranan kepala sekolah, dan (4) peningkatan mutu guru.

Indikator keberhasilan dalam meningkatkan mutu pendidikan akan berdampak dari berbagai aspek, yaitu (1) efektivitas proses pembelajaran bukan sekedar transfer pengetahuan (knowledge transfer), melainkan lebih menekankan pada internalisasi mengembangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor dan kemandirian, (2) kepemimpinan kepala sekolah akan mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan, sasaran melalui program yang dilaksanakan secara berencana, bertahap, kreativitas, inovasi, efektif, mempunyai kemampuan manajerial, (3) pengelolaan tenaga kependidikan yang efektif, (4) sekolah memiliki budaya mutu, (5) sekolah memiliki team work yang kompak, cerdas dan dinamis karena output pendidikan merupakan hasil kolektif bukan hasil individu guna memperoleh mutu yang kompetitif, (6) sekolah memiliki kemandirian, yaitu kemampuan untuk bekerja secara maksimal dengan tidak tergantung petunjuk dari atasan dan memiliki sumber daya manusia yang potensial, (7) partisipasi warga sekolah dan masyarakat. Keterkaitan dan keterlibatan pada sekolah harus tinggi dilandasi oleh rasa tanggung jawab melalui loyalitas dan dedikasi sebagai stakeholders, (8) sekolah memiliki transparansi, (9) sekolah memiliki kemauan perubahan (management change). Perubahan adalah peningkatan bermakna positif untuk lebih baik dalam peningkatan mutu pendidikan, (10) sekolah melakukan evaluasi perbaikan yang berkelanjutan dan merupakan proses penyempurnaan

dalam meningkatkan mutu keseluruhan, mencakup organisasi, tanggung jawab, prosedur dan sumber daya manusia, (11) sekolah memiliki akuntabilitas sebagai tanggung jawab terhadap keberhasilan program sekolah yang telah dilaksanakan, dan (12) output sekolah penekanannya kepada lulusan yang mandiri dan memenuhi syarat pekerjaan (qualified) (Sagala, 2010:172).

Cukup beragam penjelasan terkait dengan mutu seperti yang telah dipaparkan di atas, baik itu secara karakteristik, syarat dan faktor yang mempengaruhinya. Dari berbagai penjelasan tersebut dapat ditarik simpulan untuk mendefinisikan mutu dalam penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan yang bermutu adalah proses pendidikan melalui pembelajaran yang diselenggarakan sesuai standar dan mampu memenuhi harapan masyarakat serta menghasilkan lulusan yang unggul secara akademik maupun non akademik, sehingga mampu bersaing dalam mengakses pendidikan yang lebih tinggi atau dalam dunia kerja. Untuk mencapai pendidikan yang bermutu tersebut maka perlu ditetapkan standar penjaminan mutu pendidikan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Dengan begitu maka input, proses dan output serta outcome akan terjamin kualitasnya. Guna melaksanakan penjaminan dan pengembangan mutu supaya dapat menjawab tantangan perkembangan zaman maka perlu diterapkan melalui sebuah sistem, sehingga pembagian peran antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah dan masyarakat lebih tertata.

B. Penjaminan Mutu Pendidikan

Penjaminan mutu pendidikan adalah suatu mekanisme yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pendidikan telah sesuai dengan standar mutu, seperti yang tertera dalam Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah. Untuk

menjamin mutu pendidikan perlu juga ada pengawasan untuk memastikan proses pendidikan berjalan sesuai tujuan.

Seperti yang disampaikan oleh Hoys, Bayne, Wood (2005:17) *The control of education is and always has been of fundamental importance to both local and central government. Local government is concerned because the schooling of the children of any community will have immediate implications for the health and wealth of that community. The central government likewise is concerned for the national interest to ensure a continuance of the developments in health, welfare, social and economic terms of the nation state. Therein lies the dichotomy. Who ought to have the overriding control, the ultimate power in terms of what is taught, how it is delivered and by whom, and what mechanisms should be involved in its monitoring, evaluation and review? In addition, how should the learners be managed?*

Kontrol pendidikan merupakan hal yang penting dan mendasar baik pada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Kontrol dalam hal apa yang diajarkan, bagaimana cara menyampaikannya, disampaikan oleh siapa, dan mekanisme apa yang harus dilibatkan di dalamnya pemantauan, evaluasi, dan peninjauan? Selain itu, bagaimana seharusnya para pelajar agar berhasil.

Seperti yang disampaikan oleh Sallis (2005:17), pengontrol mutu atau pengawas biasanya melakukan kontrol mutu. Inspeksi dan pengujian adalah metode pengendalian kualitas yang paling umum, dan banyak digunakan dalam pendidikan untuk menentukan apakah standar terpenuhi. Jaminan mutu berbeda dengan kontrol mutu. Selama proses berjalan, jaminan mutu untuk mencegah kesalahan yang terjadi berulang. Jaminan kualitas merancang kualitas ke dalam proses untuk mencoba memastikan bahwa produk tersebut diproduksi sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan.

Untuk menjamin mutu barang atau jasa maka perlu ada sistem yang

dikenal dengan sistem penjaminan mutu yang memastikan proses berjalan sesuai dengan standar mutu yang dijaga dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh sistem penjaminan mutu.

Peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan ini merupakan tanggung jawab dari setiap komponen di Pemerintah Daerah. Sesuai peraturan perundangan yakni permendikbud 28 tahun 2016 fungsi dan tujuan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah berfungsi untuk mengendalikan penyelenggaraan pendidikan oleh Pemerintah Daerah pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah sehingga terwujud pendidikan yang bermutu. Peningkatan mutu di Pemerintah Daerah tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya budaya mutu pada seluruh komponen sekolah. Untuk peningkatan mutu sekolah secara utuh dibutuhkan pendekatan khusus agar seluruh komponen sekolah bersama-sama memiliki budaya mutu. Untuk itu dibutuhkan program Implementasi Penjaminan Mutu Pendidikan di seluruh sekolah di Indonesia dengan pendekatan pelibatan seluruh komponen sekolah (*whole school approach*).

Dalam konsep Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP), peningkatan mutu pendidikan harus dilaksanakan dengan berbasis data yang telah dianalisis dengan akurat dan benar. Analisis data ini kemudian menghasilkan rekomendasi yang dapat digunakan sebagai base-line data untuk dasar merencanakan kegiatan dan program peningkatan mutu secara proporsional, akurat, dan berkelanjutan. Sekolah/Madrasah adalah pelaku utama dalam proses penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan di tingkat Pemerintah Daerah.

Hasil pemetaan mutu pendidikan tersebut selanjutnya akan dianalisis untuk dapat menghasilkan peta mutu dan rekomendasi program peningkatan mutu yang tepat sebagai upaya pemenuhan 8 (delapan) SNP di tingkat daerah. Berbagai rekomendasi yang dirumuskan berdasarkan hasil analisis pemetaan mutu pendidikan kemudian perlu dituangkan ke

dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang pada akhirnya diharapkan menjadi APBD.

Sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah terdiri atas: Sistem penjaminan mutu internal (SPMI) yang dilaksanakan dalam Pemerintah Daerah dan dijalankan oleh seluruh komponen Pemerintah Daerah dan Sistem penjaminan mutu eksternal (SPME) yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, lembaga akreditasi dan lembaga standarisasi pendidikan.

Penjaminan mutu pendidikan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang telah ditetapkan sebagai kriteria minimal yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah dan penyelenggara pendidikan. Standar Nasional Pendidikan terdiri atas 8 standar, yakni: Standar Kompetensi Lulusan, (2) Standar Isi, (3) Standar Proses, Standar Penilaian, (5) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, (6) Standar Sarana dan Prasarana, (7) Standar Pengelolaan, dan (8) Standar Pembiayaan.

Kedelapan standar tersebut membentuk rangkaian input, proses, dan output. Standar Kompetensi Lulusan merupakan output dalam rangkaian tersebut dan akan terpenuhi apabila input terpenuhi sepenuhnya dan proses berjalan dengan baik. Standar yang menjadi input dan proses dideskripsikan dalam bentuk hubungan sebab-akibat dengan output. Untuk mempermudah kegiatan pemetaan mutu dalam penjaminan mutu pendidikan, baik dalam SPMI maupun SPME, selanjutnya kedelapan Standar Nasional Pendidikan tersebut telah dijabarkan dalam bentuk indikator dan sub indikator mutu.

C. Rapor Pendidikan

Kebijakan merdeka belajar episode ke 19 yakni tentang Rapor Pendidikan, Rapor Pendidikan Publik merupakan gambaran mengenai mutu pendidikan pada suatu wilayah berdasarkan kerangka penilaian yang

dikembangkan dari model input, proses, dan output tentang kinerja atau efektivitas satuan pendidikan.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mendorong satuan pendidikan dan pemerintah daerah untuk memanfaatkan hasil rapor pendidikan sebagai referensi utama, dasar analisis, dan tindak lanjut peningkatan dari kualitas pendidikan. Oleh karena itu pengguna seperti kepala satuan pendidikan dan kepala daerah melalui dinas pendidikan perlu memahami betul hasil dari Rapor Pendidikan.

Hasil dari Rapor Pendidikan sudah dibuat dan dijabarkan secara ringkas dan sederhana sehingga kepala satuan pendidikan, kepala dinas pendidikan atau tenaga kependidikan hanya perlu memiliki kemampuan statistik dasar untuk dapat melakukan analisis dari data yang disajikan.

Rapor Pendidikan jenjang pendidikan dasar, menengah dan anak usia dini dibagi menjadi beberapa bagian besar yang disebut dengan dimensi, dimensi ini dikodekan dengan Huruf Kapital (A, B, C, D, dan E), saat ini pada profil pendidikan dasar, menengah dan anak usia dini terdapat 5 dimensi (A – E). Kemudian dalam setiap dimensi memuat 2 jenis level indikator yang disebut indikator level 1 dan indikator level 2.

Indikator level 1 dikodekan dengan gabungan dimensi dan penomoran indikator, contohnya seperti pada pendidikan dasar. Indikator literasi murid dikodekan menjadi A.1, kemudian beberapa indikator level 1 memiliki beberapa indikator di bawahnya yang disebut dengan indikator level 2. Indikator level 2 ini dikodekan dengan kode indikator level 1 ditambah dengan penomoran indikator level 2. Contohnya dibawah indikator level 1 literasi murid (A.1)

Untuk dapat membaca hasil Rapor Pendidikan, perlu juga dapat melihat instrumen-instrumen berikut untuk membaca data yang terdapat di

dalamnya Label capaian dalam bentuk spektrum warna, terdiri dari: Biru (sangat baik), Hijau (baik), Kuning (cukup), Merah (kurang)

Dalam menganalisis indikator-indikator di bagian input (hal-hal yang mendukung proses belajar-mengajar) dan proses (hal-hal yang mendukung untuk perbaikan mutu atau hasil pembelajaran) untuk mencari akar permasalahan dari rendahnya hasil Rapor Satuan Pendidikan.

Contohnya, Bila hasil literasi dan numerasi di satuan pendidikan rendah, maka pihak sekolah dapat mencoba menganalisis indikator-indikator di bagian input dan proses untuk mencari akar masalah yang menyebabkan rendahnya literasi dan numerasi. Kemudian, satuan pendidikan dan pemerintah daerah dapat melakukan perencanaan berbasis data.

Rapor Pendidikan dapat digunakan untuk perbaikan guna mewujudkan transformasi Pemerintah Daerah, Rapor Pendidikan dan Perencanaan Berbasis Data adalah bagian dari Merdeka Belajar untuk memastikan pendidikan berkualitas untuk seluruh rakyat Indonesia, berdasarkan hasil rapor pendidikan ini diharapkan dapat:

1. **“Sekolahkan Anak Indonesia” Angka Partisipasi Tinggi >95% di seluruh jenjang pendidikan dasar dan menengah; >70% pada jenjang pendidikan tinggi;**
2. **“Dorong Pembelajaran Peserta didik ” Hasil Belajar Berkualitas Memiliki pengetahuan dan keterampilan yang relevan, hasil penelitian berkualitas tinggi, dan >90% tingkat penempatan kerja;**
3. **“Tidak Ada Anak yang Tertinggal” Distribusi yang merata Baik secara geografis maupun status sosial ekonomi.**

Pada platform rapor pendidikan terdapat profil pendidikan merupakan laporan komprehensif tentang layanan pendidikan PAUD Dikdasmen berdasarkan hasil evaluasi sistem pendidikan yang bersumber dari hasil Asesmen Nasional, Dapodik, Data Pendidikan Kemenag, Platform Digital

guru dan Kepala Sekolah, *Tracer Study* SMK, Data GTK, BPS dan Lainnya.

Profil Pendidikan merupakan laporan hasil evaluasi layanan pendidikan sebagai penyempurnaan rapor mutu sebelumnya, Rapor Pendidikan terdiri dari indikator-indikator yang merefleksikan delapan Standar Nasional Pendidikan dan mencakup area yang berkaitan dengan input, proses, dan output pembelajaran.

Pada profil pendidikan area *input*, proses, dan *output* yang di petakan kedalam dimensi, sebagai berikut:



Gambar 1 Peta Profil Pendidikan

Berdasarkan bagan di atas dapat di jelaskan bahwa pada bagian Area Output terdapat dua dimensi yaitu Dimensi A mutu dan relevansi hasil belajar peserta didik, Dimensi B pemerataan pendidikan yang bermutu. Pada Area Proses terdapat dua dimensi juga yakni Dimensi D mutu dan relevansi pembelajaran dan Dimensi E pengelolaan Pemerintah Daerah yang partisipatif, transparan dan akuntabel, dan pada Area Input juga dijelaskan oleh dua dimensi yaitu Dimensi C kompetensi dan kinerja GTK.

Perencanaan berbasis data merupakan sebuah perubahan kebiasaan untuk mendorong Satuan Pendidikan dan Pemerintah Daerah menyusun kegiatan peningkatan capaian pembelajaran berdasarkan fakta. Proses perencanaan berbasis data melalui tiga tahapan utama yaitu :

1. **Mengidentifikasi masalah** berdasarkan indikator yang ditampilkan di dalam Rapor Pendidikan
2. **Melakukan refleksi capaian, pemerataan, dan proses pembelajaran di Pemerintah Daerah dan daerah masing-masing**
3. **Melakukan pembenahan melalui perumusan kegiatan dalam bentuk rencana** kegiatan dan anggaran Pemerintah Daerah (BOSP) dan daerah (APBD)

Perencanaan Berbasis Data adalah proses yang berkelanjutan dan terintegrasi dalam siklus perencanaan pemerintah daerah, hal ini sejalan dengan permendikbud No.28 Tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah, dimana siklusnya melalui beberapa tahapan yaitu :

1. Langkah 1 Analisis Profil Pendidikan.
2. Langkah 2 Analisis Akar Masalah.
3. Langkah 3 Perumusan Program dan Kegiatan.
4. Langkah 4 Memasukkan dalam dokumen perencanaan dan anggaran.
5. Langkah 5 Pelaksanaan Kegiatan
6. Langkah 6 Monitoring dan Evaluasi

D. Kerangka Berpikir

Pelaksanaan SPMP yang sudah berjalan perlu dilihat kembali terutama data base yang digunakan untuk memulai melakukan perbaikan, Rapor Pendidikan menampilkan hasil asesmen dan juga survei nasional suatu satuan pendidikan maupun daerah.

Melalui Rapor Pendidikan, sekolah maupun daerah dapat menggunakan data dalam rapor tersebut untuk mengidentifikasi masalah, merefleksikan akarnya, dan membenahi kualitas pendidikan secara

menyeluruh. Sehingga perencanaan berbasis data yang lalu menggunakan rapor mutu sebagai dasar data base nya sekarang menggunakan Rapor Pendidikan hasil Asesmen.

BAB III

METODOLOGI PENULISAN

A. Pendekatan Penelitian

Penulisan ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Dalam kajian ini dilakukan analisis terhadap capaian Rapor Pendidikan tahun 2021. Analisis dilakukan untuk mengetahui capaian-capaian apa saja yang belum dan telah tercapai di satuan pendidikan khususnya Dimensi D jenjang Sekolah Dasar di kabupaten Penajam Paser Utara.

B. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diambil dalam tulisan ini adalah hasil Rapor Pendidikan tahun 2021, yang dirilis oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan teknologi pada tahun 2022.

C. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data hasil rapor pendidikan jenjang Sekolah Dasar dilakukan untuk menganalisis ketercapaian pada setiap Dimensi. Data diolah melalui analisis deskriptif kuantitatif untuk menunjukkan ketercapaian pada setiap Dimensi.

BAB IV

HASIL ANALISIS, PEMBAHASAN DAN REKOMENDASI

A. Hasil Analisis Pada Dimensi D

Nomor Indikator	Nama Indikator	Nilai Kabupaten/kota Anda	Capaian	Perbandingan		
				Kab/Kota serupa di nasional	Rata-Rata di provinsi	Rata-Rata di nasional
D.1	Kualitas pembelajaran	1.9	Terarah	1.89	1.9	1.9
D.2	Refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru	2.06	Aktif	1.9	1.87	1.92
D.3	Kepemimpinan instruksional	1.99	Terarah	1.72	1.7	1.72
D.4	Iklim keamanan sekolah	2.22	Waspada	2.16	2.24	2.18
D.5	Kesenjangan iklim keamanan sekolah	3	Tidak ada kesenjangan	2.77	2.5	2.6
D.6	Iklim Kesenjangan Gender	Data Terbaru Belum Tersedia	Data Terbaru Belum Tersedia			
D.8	Iklim Kebinekaan	2.22	Merintis	2.18	2.18	2.16
D.9	Kesenjangan Iklim Kebinekaan	3	Tidak ada kesenjangan	2.77	2.5	2.6
D.10	Iklim Inklusivitas	2.03	Merintis	1.97	1.98	1.96
D.11	Kesenjangan Iklim Inklusivitas	3	Tidak ada kesenjangan	2.77	2.5	2.6
D.12	Kesenjangan fasilitas sekolah antar wilayah	3	Kecil	3.2	7.5	3.41
D.13	Kesenjangan kebersihan sekolah (termasuk sanitasi) antar wilayah	2.5	Kecil	16.75	12.24	13.35

Tabel 1. Agregasi Capaian Dimensi D

Pada Tabel 1 diperoleh hasil bahwa capaian dimensi D untuk Kualitas Pembelajaran kategori terarah dengan nilai capaian 1,9 di bawah rata-rata provinsi dan nasional, Refleksi dan Perbaikan Pembelajaran oleh Guru kategori Aktif dengan nilai capaian 2,06 berada di atas rata-rata provinsi dan di bawah rata-rata nasional, Kepemimpinan Instruksional kategori terarah dengan nilai capaian 1,99 di atas rata-rata provinsi dan nasional, Iklim Keamanan Sekolah kategori Waspada dengan nilai capaian 2,22 di bawah rata-rata provinsi dan di atas rata-rata nasional, untuk Iklim Kebhinekaan tidak ada kesenjangan dengan nilai capaian 3 di atas rata-rata provinsi dan nasional, demikian juga untuk Iklim Inklusivitas tidak ada kesenjangan dengan nilai capaian 3 di atas rata-rata provinsi dan nasional.

1. Capaian Kualitas Pembelajaran Rapor Pendidikan Tahun 2021

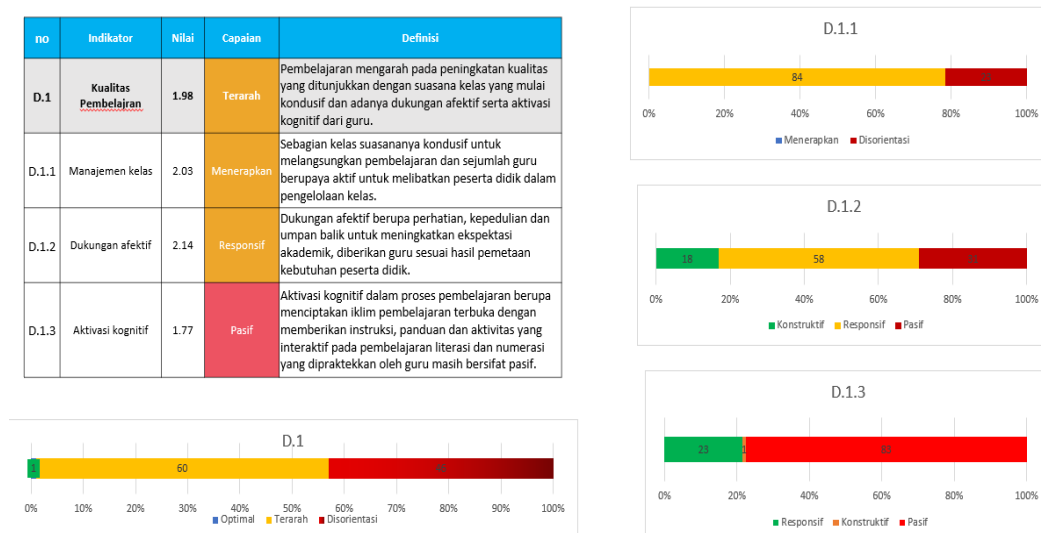
Kualitas Pembelajaran (D.1) merupakan salah satu indikator level 1 pada dimensi D, yakni untuk melihat capaian Tingkat kualitas interaksi

antara guru, murid, dan materi pembelajaran dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

Kualitas Pembelajaran meliputi empat indikator yakni:

- 1) D.1.1 Manajemen, Praktik pembelajaran melihat proses perilaku murid dan pemusatan perhatian terhadap aktivitas tugas yang relevan.
- 2) D.1.2 Dukungan afektif, Praktik pembelajaran dengan melihat pemenuhan kebutuhan murid guna merasa kompeten dan dihargai sebagai bagian dari kelas.
- 3) D.1.3 Aktivasi kognitif, Praktik pengajaran yang bertujuan untuk membimbing dan mendukung murid dalam membangun pemahaman atau pengetahuan baru.
- 4) D.1.4 Pembelajaran praktik vs teori, Kualitas pelaksanaan praktik dan teori di satuan Pendidikan di SMK

Berdasarkan indikator tersebut hasil rapor pendidikan khususnya kualitas pembelajaran di kabupaten Penajam Paser Utara jenjang Sekolah Dasar dapat dilihat pada tabel berikut:



Gambar 2. Agregasi Capaian Kualitas Pembelajaran

Terlihat dari gambar 2. Bahwa Kualitas Pembelajaran dilihat dari tingkat kualitas interaksi antara guru, murid, dan materi pembelajaran dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

Berdasar data pada Gambar 2. direkomendasikan pada Pemerintah daerah Penajam Paser Utara untuk:

- 1) Mendorong pada 60 sekolah dan secara khusus 46 sekolah agar gurunya menciptakan kualitas pembelajaran yang optimal.
- 2) Mendorong semua guru agar berupaya aktif untuk melibatkan peserta didik dalam pengelolaan kelas, sehingga tercipta seluruh kelas suasananya kondusif untuk melangsungkan pembelajaran khususnya pada 23 **sekolah** dengan capaian **disorientasi** pada subindikator D.1.1 manajemen kelas.
- 3) Mendorong guru agar memberikan dukungan afektif berupa perhatian, kepedulian dan umpan balik untuk meningkatkan ekspektasi akademik secara konstruktif di 31 **sekolah** dengan capaian **pasif** pada subindikator D.1.2 dukungan afektif.
- 4) Mendorong guru untuk menciptakan iklim pembelajaran terbuka dengan memberikan instruksi dan panduan, serta aktivitas yang interaktif pada pembelajaran literasi dan numerasi yang dipraktikkan bersifat konstruktif di 83 **sekolah** dengan capaian **Pasif** pada subindikator D.1.3 aktivasi kognitif.

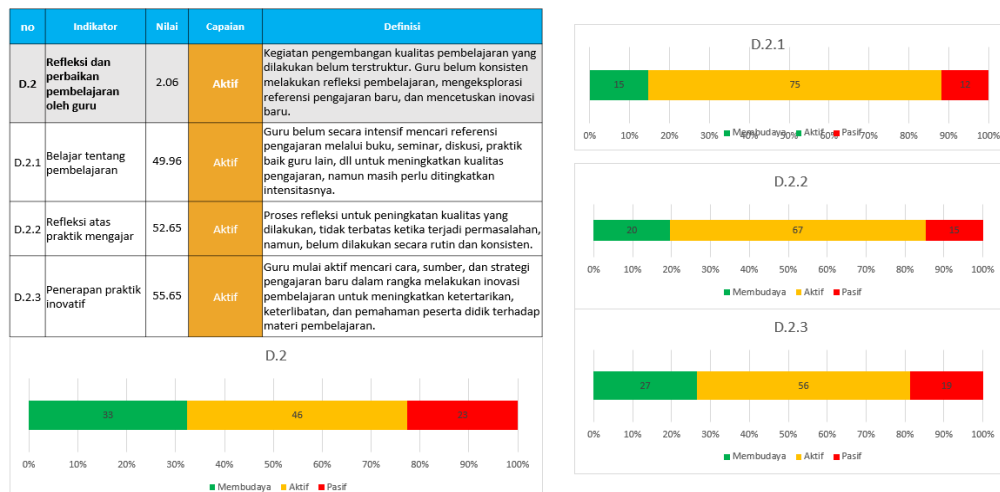
2. Capaian Refleksi dan Perbaikan Pembelajaran Oleh Guru Rapor Pendidikan Tahun 2021

Refleksi dan Perbaikan Pembelajaran oleh Guru (D.2) merupakan salah satu indikator level 1 pada dimensi D, yakni Tingkat aktivitas refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru.

Refleksi dan Perbaikan Pembelajaran oleh Guru meliputi tiga indikator yakni:

- 1) D.2.1 Belajar tentang pembelajaran, Aktivitas belajar yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mengajar.
- 2) D.2.2 Refleksi atas praktik mengajar, Tingkat refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru khusus penilaian refleksi atas praktik mengajar.
- 3) D.2.3 Penerapan praktik inovatif, Tingkat refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru khusus penilaian penerapan praktik inovatif

Berdasarkan indikator tersebut hasil rapor pendidikan khususnya Refleksi dan Perbaikan Pembelajaran oleh Guru di kabupaten Penajam Paser Utara jenjang Sekolah Dasar dapat dilihat pada tabel berikut:



Gambar 3. Agregasi Capaian Refleksi dan Perbaikan Pembelajaran Oleh Guru

Berdasarkan data pada Gambar 3. direkomendasikan pada Pemerintah daerah Penajam Paser Utara untuk:

- 1) Mendorong guru agar aktif meningkatkan kualitas pembelajaran setelah melakukan refleksi pembelajaran yang telah lalu, mengeksplorasi referensi pengajaran baru, dan berinovasi menghadirkan pembelajaran yang memantik keterlibatan peserta didik. Pada 46 sekolah dan khususnya **23 sekolah** dengan capaian **Pasif**.
- 2) Mendorong guru agar aktif mencari referensi pengajaran melalui buku, seminar, diskusi, praktik baik guru lain, dll untuk meningkatkan kualitas pengajaran, khususnya pada 12 **sekolah** dengan capaian **pasif** pada subindikator D.2.1 Belajar tentang pembelajaran
- 3) Mendorong guru agar melakukan refleksi secara rutin dan konsisten, ditindaklanjuti dengan pencarian sumber belajar baik dari buku, diskusi, praktik baik orang lain, maupun berbagai sumber belajar lainnya untuk peningkatan kualitas dan pengembangan inovasi, khususnya pada 15 **sekolah** dengan capaian **pasif** pada subindikator D.2.2 Refleksi atas

praktik mengajar.

- 4) Mendorong Guru agar terbiasa mencari cara, sumber, dan strategi pengajaran baru dalam rangka melakukan inovasi pembelajaran untuk meningkatkan ketertarikan, keterlibatan, dan pemahaman murid terhadap materi pembelajaran khususnya pada 10 **sekolah** dengan capaian **pasif** pada subindikator D.2.3 Penerapan praktik inovatif.

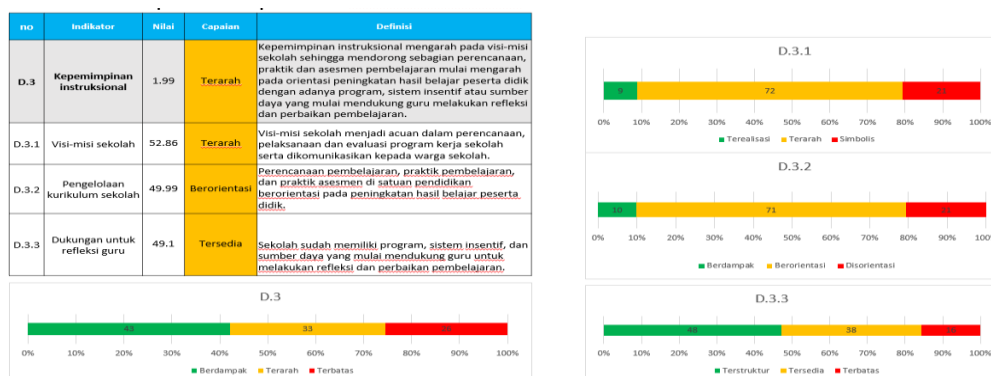
3. Capaian Kepemimpinan Intruksional Rapor Pendidikan Tahun 2021

Kepemimpinan Intruksional (D.3) merupakan salah satu indikator level 1 pada dimensi D, yakni Tingkat kepemimpinan instruksional sekolah yang mendukung perbaikan kualitas pembelajaran.

Kepemimpinan Intruksional meliputi tiga indikator yakni:

- 1) D.3.1 Visi-misi sekolah, Penyampaian dan penerapan visi-misi sekolah yang berpusat pada perbaikan pembelajaran.
- 2) D.3.2 Pengelolaan kurikulum sekolah, Mengelola pengembangan kurikulum sekolah dengan berorientasi pada peningkatan hasil belajar murid.
- 3) D.3.3 Dukungan untuk refleksi guru, Program, sistem insentif, dan sumberdaya yang mendukung refleksi guru dan perbaikan pembelajaran

Berdasarkan indikator tersebut hasil rapor pendidikan khususnya Kepemimpinan Intruksional di kabupaten Penajam Paser Utara jenjang Sekolah Dasar dapat dilihat pada tabel berikut:



Gambar 4. Agregasi Capaian Kepemimpinan Intruksional

Dari data pada Gambar 4. direkomendasikan pada Pemerintah

daerah Penajam Paser Utara untuk:

- 1) Mendorong terwujudnya Kepemimpinan instruksional yang visioner dengan mengacu pada visi-misi sekolah secara konsisten termasuk mengkomunikasikan visi-misi kepada warga sekolah sehingga perencanaan, praktik dan asesmen pembelajaran berorientasi peningkatan hasil belajar murid melalui dukungan program, sistem insentif atau sumber daya yang memadai yang berdampak pada membudayanya guru melakukan refleksi dan perbaikan pembelajaran, pada **33 Sekolah** dan khususnya pada **26 sekolah** dengan capaian **Terbatas**.
- 2) Mendorong sekolah agar menjadi visi-misi sekolah sebagai acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan program kerja sekolah serta dikomunikasikan kepada warga sekolah yang dipantau kemajuan realisasinya mewujudkan visi-misi sekolah menggunakan data , khususnya pada **21 Sekolah** dengan capaian **Simbolis** pada subindikator D.3.1 Visi-misi Sekolah;
- 3) Mendorong sekolah agar perencanaan pembelajaran, praktik pembelajaran, dan praktik asesmen di satuan pendidikan sudah berorientasi pada peningkatan hasil belajar murid, khususnya pada **21 sekolah** dengan capaian **Disorientasi** pada subindikator D.3.2 Pengelolaan Kurikulum Sekolah;
- 4) Sekolah sudah memiliki program, sistem insentif, dan sumber daya yang telah mendukung guru untuk melakukan refleksi dan perbaikan pembelajaran, pada **16 sekolah** dengan capaian **Terbatas** pada subindikator D.3.3 Dukungan Untuk Refleksi Guru.

4. Capaian Iklim Keamanan Sekolah Rapor Pendidikan Tahun 2021

Iklim Keamanan Sekolah (D.4) merupakan salah satu indikator level 1 pada dimensi D, yakni Tingkat rasa aman dan kenyamanan murid dari hal rasa aman di sekolah, perundungan, hukuman fisik, pelecehan seksual, dan aktivitas narkoba di lingkungan sekolah.

Iklm Keamanan Sekolah meliputi enam indikator yakni:

- 1) D.4.1 Kesejahteraan psikologis murid, Tingkat kesejahteraan murid di sekolah terhadap perasaan aman dan berkehidupan.
- 2) D.4.2 Kesejahteraan psikologis guru, Tingkat kesejahteraan guru ketika berada di lingkungan sekolah dan saat mengajar.
- 3) D.4.3 Perundungan, Perilaku menyakiti orang lain (secara fisik dan psikis) yang dilakukan secara sengaja dan berulang-ulang.
- 4) D.4.4 Hukuman fisik, Tingkat aktivitas yang berkaitan dengan pemberian hukuman fisik untuk meningkatkan disiplin murid.
- 5) D.4.5 Kekerasan seksual, Tingkat aktivitas yang berkaitan dengan kekerasan seksual di satuan pendidikan dan murid yang berada pada sekolah tersebut.
- 6) D.4.6 Narkoba, Tingkat aktivitas yang berkaitan dengan narkoba di satuan pendidikan dan murid yang berada pada sekolah tersebut.

Berdasarkan indikator tersebut hasil rapor pendidikan khususnya Iklm Keamanan Sekolah di kabupaten Penajam Paser Utara jenjang Sekolah Dasar dapat dilihat pada tabel berikut:



Gambar 5. Iklm Keamanan Sekolah

Dari data pada Gambar 5. direkomendasikan pada Pemerintah daerah Penajam Paser Utara untuk:

- 1) Mendorong satuan Pendidikan agar mewujudkan lingkungan sekolah yang aman, terlihat dari kesejahteraan psikologis yang baik dan

rendahnya kasus perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual, dan penyalahgunaan narkoba, serta dapat mempertahankan kualitas warga sekolah dalam mencegah dan menangani kasus untuk menciptakan iklim keamanan di lingkungan sekolah. Khususnya 57 sekolah dengan capaian waspada dan rawan.

- 2) Peserta didik merasa aman, nyaman, dan sejahtera ketika berada di lingkungan sekolah. Masih ada **12** sekolah yang perlu ditingkatkan
- 3) Guru merasa menjadi bagian tak terpisahkan dari satuan pendidikan sehingga mereka sudah sepenuhnya antusias dalam menjalani peran sebagai seorang pendidik.
- 4) Satuan pendidikan aman dari kasus perundungan. Kepala sekolah dan guru telah memiliki konsepsi yang tepat dan yakin dengan pengetahuan dan kemampuannya terkait perundungan.
- 5) Satuan pendidikan aman dari kasus hukuman fisik. Kepala sekolah dan guru telah memiliki konsepsi yang tepat dan yakin dengan pengetahuan dan kemampuannya terkait hukuman fisik.
- 6) Satuan pendidikan aman dari kasus pelecehan seksual. Kepala sekolah dan guru sudah memahami dan meyakini konsep, definisi, bentuk, cara pencegahan dan kemampuan penanganan pelecehan seksual. Masih ada 51 sekolah yang rawan.
- 7) Satuan pendidikan aman dari kasus penyalahgunaan narkoba. Kepala sekolah dan guru memahami pengertian narkoba dan contoh penyalahgunaan narkoba. Masih ada **19** sekolah yang rawan.

5. Capaian Iklim Kebhinekaan Rapor Pendidikan Tahun 2021

Iklim Kebhinekaan (D.8) merupakan salah satu indikator level 1 pada dimensi D, yakni menyangkut bagaimana lingkungan sekolah menyikapi keragaman seperti perbedaan individu, identitas, maupun latar belakang sosialbudaya dan mengenai komitmen kebangsaan.

Iklim Kebhinekaan meliputi empat indikator yakni:

- 1) D.8.1 Toleransi agama dan budaya, yakni Sikap menerima dan menghargai

keragaman agama dan budaya di sekolah.

- 2) D.8.2 Sikap Inklusif, yakni Sikap inklusif murid dan guru di sekolah.
- 3) D.8.3 Dukungan atas kesetaraan agama, yakni Dukungan dalam kesetaraan hak - hak sipil antara kelompok mayoritas dan minoritas agama dan budaya dari guru dan pimpinan sekolah.
- 4) D.8.4 Komitmen kebangsaan, Tingkat komitmen kebangsaan pimpinan sekolah.

Berdasarkan indikator tersebut hasil rapor pendidikan khususnya Iklim Kebhinekaan di kabupaten Penajam Paser Utara jenjang Sekolah Dasar dapat dilihat pada tabel berikut:



Gambar 6. Agregasi Capaian Iklim Kebinekaan

Satuan pendidikan sudah mampu menghadirkan suasana proses pembelajaran yang menjunjung tinggi toleransi agama/kepercayaan dan budaya; mendapatkan pengalaman belajar yang berkualitas; mendukung kesetaraan agama/ kepercayaan, budaya dan gender, serta memperkuat nasionalisme. Ada 1 Sekolah yang perlu ditingkatkan.

Dari data pada Gambar 6. direkomendasikan pada Pemerintah daerah Penajam Paser Utara untuk:

- 1) Satuan pendidikan mengakui, menghargai, menerima, mendukung dan merawat keragaman agama/kepercayaan dan budaya. Terdapat 1 sekolah masih perlu ditingkatkan

- 2) Satuan pendidikan mendukung dan mengakomodir semua peserta didik untuk mendapatkan pengalaman belajar yang berkualitas. Terdapat 38 sekolah yang perlu peningkatan
- 3) Satuan pendidikan secara aktif mensosialisasikan dan menyuarakan dukungan pentingnya mewujudkan kesetaraan hak-hak sipil antara kelompok agama/kepercayaan dan budaya mayoritas dan minoritas dengan dasar prinsip keadilan. Terdapat 7 sekolah perlu peningkatan
- 4) Satuan Pendidikan mengetahui lemahnya komitmen kebangsaan dan menindak pelanggaran tersebut dengan cara-cara yang demokratis, seperti bertukar pikiran satu sama lain. Terdapat 1 sekolah perlu peningkatan.

6. Capaian Iklim Inklusivitas Rapor Pendidikan Tahun 2021

Iklim Inklusivitas (D.10) merupakan salah satu indikator level 1 pada dimensi D, yakni bagaimana lingkungan sekolah menyikapi keragaman seperti perbedaan individu, identitas, maupun latar belakang sosialbudaya.

Iklim Inklusivitas meliputi tiga indikator yakni:

- 1) D.10.1 Layanan disabilitas, yakni Layanan sekolah yang melingkupi pengetahuan dan sikap tentang murid dengan disabilitas.
- 2) D.10.2 Layanan sekolah untuk murid cerdas dan bakat istimewa, yakni Layanan sekolah yang melingkupi pengetahuan dan sikap tentang murid cerdas dan berbakat istimewa.
- 3) D.10.3 Sikap Terhadap Disabilitas, yakni Sikap guru terhadap disabilitas tentang aspek afektif, kognitif, dan perilaku.

Berdasarkan indikator tersebut hasil rapor pendidikan khususnya Iklim Inklusivitas di kabupaten Penajam Paser Utara jenjang Sekolah Dasar dapat dilihat pada tabel berikut:



Gambar 7. Agregasi Capaian Iklim Inklusivitas

Satuan pendidikan sudah memiliki pengetahuan, sikap yang tepat, dan kemampuan untuk melaksanakan praktik pembelajaran khusus bagi peserta didik dengan disabilitas. Terdapat 10 sekolah yang perlu ditingkatkan.

Dari data pada Gambar 7. direkomendasikan pada Pemerintah daerah Penajam Paser Utara untuk:

- 1) Satuan pendidikan sudah memiliki pengetahuan, sikap yang tepat, dan kemampuan untuk melaksanakan praktik pembelajaran khusus bagi peserta didik dengan disabilitas. Ada **12** sekolah perlu ditingkatkan
- 2) Satuan pendidikan sudah memiliki pengetahuan, sikap yang tepat, dan kemampuan untuk melaksanakan praktik pembelajaran khusus bagi peserta didik dengan kecerdasan dan bakat istimewa. Ada 34 sekolah yang perlu ditingkatkan
- 3) Murid sudah menerima keberadaan murid disabilitas, sehingga merasa nyaman dan bisa berteman akrab. Ada 2 sekolah perlu ditingkatkan

B. Dimensi D sebagai Indikator Pelaksanaan Proses Pembelajaran

1. Kualitas Pembelajaran

Menurut Mariani, kualitas pembelajaran secara operasional dapat diartikan sebagai intensitas keterkaitan sistemik dan sinergis antara guru, siswa, iklim pembelajaran, serta media pembelajaran dalam menghasilkan proses dan hasil belajar yang optimal sesuai dengan tuntutan kurikuler (Haryati & Rochman. 2012: 2). Menurut Daryanto menyebutkan bahwa kualitas pembelajaran adalah suatu tingkatan pencapaian dari tujuan pembelajaran awal termasuk didalamnya adalah pembelajaran seni, dalam pencapaian tujuan tersebut berupa peningkatan pengetahuan, keterampilan dan pengembangan sikap peserta didik melalui proses pembelajaran dikelas (Prasetyo, 2013: 12).

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa kualitas pembelajaran dapat mengukur sejauh mana tingkat pencapaian hasil dari tujuan pembelajaran itu sendiri. Tujuan pembelajaran yang sudah tercapai akan menghasilkan hasil belajar yang optimal dari peserta didik, kualitas dapat dimaknai sebagai mutu atau keefektifan. Kualitas pembelajaran memiliki indikator menurut Depdiknas dalam Prasetyo (2013: 13) antara lain:

1) Perilaku pembelajaran pendidik (guru)

Keterampilan dalam mengajar seorang guru menunjukkan karakteristik umum dari seseorang yang berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan yang diwujudkan dalam bentuk tindakan.

2) Perilaku atau aktivitas siswa

Disekolah banyak aktivitas yang dapat dilakukan oleh siswa di sekolah. Aktivitas sekolah tidak hanya belajar, membaca buku, mencatat ataupun mendengarkan guru mengajar. Aktivitas siswa bisa berupa

aktivitas diluar kelas, ekstrakurikuler atau kegiatan lainnya.

3) Iklim pembelajaran

Iklim pembelajaran dapat berupa suasana kelas yang kondusif dan suasana sekolah yang nyaman.

2. Refleksi dan Perbaikan Pembelajaran oleh Guru

Pengajaran melibatkan semacam seperangkat keterampilan yang kompleks sehingga pelajaran hampir tidak pernah sempurna. Kunci untuk menjadi guru yang berhasil adalah memperoleh keterampilan untuk terus meningkatkan praktik seseorang; dan alat penting untuk hal ini adalah refleksi.

Seorang guru yang telah melakukan refleksi diri, jika ditanya apa yang akan dilakukan jika harus mengajarkan ulang materi yang sama kepada siswa yang sama di waktu mendatang, maka guru itu dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dilakukan. Misalnya terkait dengan hal-hal: bagaimana dengan pengelompokan siswa, alat apa yang perlu disediakan, langkah-langkah (skenario) pembelajaran, metode atau model pembelajaran yang akan digunakan. Gambaran yang diberikan guru tersebut, apabila dibandingkan dengan skenario pembelajaran sebelumnya, pasti ada perubahan yang mengarah pada perbaikan.

Hasil alami dari refleksi atas praktik pembelajaran adalah guru dapat merasakan di area mana dari pembelajaran yang paling penting untuk diperkuat. Dengan demikian, guru akan senantiasa memperbaiki diri dalam pembelajaran, yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar siswa. Dengan demikian, mutu pendidikan pun akan meningkat.

3. Kepemimpinan Instruksional

Kepemimpinan instruksional kepala sekolah melakukan pendampingan bagi guru mulai dari merencanakan pembelajaran,

mengelola proses pembelajaran, sampai pada mengevaluasi pembelajaran. Dimana, kegiatan tersebut merupakan tugas pokok pengajaran yang wajib dikuasai guru.

Kepemimpinan instruksional merupakan kepemimpinan yang memusatkan perhatiannya pada sikap-sikap guru ketika mereka terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan langsung dengan perkembangan siswa, Lahui-Ako (2001)

Kepemimpinan instruksional berkaitan dengan peran dan tugas kepala sekolah yang mencakup hal-hal seperti mengemban tugas penting dalam menyusun dan mengkomunikasikan tujuan-tujuan sekolah, menciptakan pengharapan-pengharapan dan standar-standar, mengkoordinir kurikulum, mengawasi dan mengevaluasi instruksi (pengajaran), memperluas kesempatan siswa untuk belajar, dan meningkatkan profesionalisme para staf. Glickman, Gordon, dan Ross-Gordon (2001). Kepemimpinan instruksional merupakan integrasi tugas-tugas asistensi langsung terhadap para guru, pengembangan kelompok, pengembangan staf, pengembangan kurikulum, dan penelitian. Hill (2002)

Peran utama pemimpin instruksional, 1) memimpin dan mengelola perubahan, 2) memotivasi dan mengelola sumber daya manusia, 3) mendesain dan mengatur sistem, proses serta sumber daya. Hale & Moorman (2003).

Kepemimpinan instruksional adalah kepemimpinan yang dibutuhkan pada abad 21, selain kepemimpinan visionary dan kepemimpinan masyarakat.

Mengutip buku Kepemimpinan Efektif oleh Husaini Usman, ada beberapa peran yang harus dilakukan dalam kepemimpinan instruksional:

- 1) Mendefinisikan dan mengomunikasikan misi sekolah.
- 2) Mengordinasikan kurikulum.

- 3) Melakukan supervisi terhadap guru.
- 4) Memantau kemajuan siswa.
- 5) Memelihara iklim yang positif.
- 6) Berkolaborasi dengan stakeholders sekolah.

Di samping itu, berikut kualitas atau mutu yang harus dimiliki oleh pemimpin instruksional:

- 1) Sebagai penyedia sumber daya.
- 2) Sebagai sumber instruksional.
- 3) Sebagai komunikator yang baik.
- 4) Sebagai teladan di sekolah.

Dalam membangun dan menerapkan kepemimpinan instruksional, hendaknya mempersiapkan strategi dalam kepemimpinan instruksional, yaitu:

- 1) Menerapkan keteladanan.
- 2) Berinteraksi dan berdialog dengan guru.
- 3) Menciptakan serta menggunakan komunikasi yang efektif.
- 4) Memfasilitasi guru.
- 5) Mengawasi secara efektif.
- 6) Menjalankan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB).

4. Iklim Keamanan Sekolah

Iklim keamanan sekolah mencakup indikator-indikator seperti kejadian perundungan, penggunaan narkoba, dan kekerasan di sekolah. Di luar iklim sekolah, bagian terbesar dari Survei Lingkungan Belajar

sebenarnya adalah berbagai aspek yang secara langsung terkait kualitas pembelajaran.

Salah satu aspek penting yang mendukung keberhasilan proses pembelajaran adalah iklim sekolah. Iklim sekolah yang kondusif adalah iklim yang benar-benar sesuai dan mendukung kelancaran serta kelangsungan proses pembelajaran yang dilakukan guru. Di negara-negara maju, riset tentang iklim sekolah telah berkembang dengan mapan dan memberikan sumbangan yang cukup signifikan bagi pembentukan sekolah-sekolah yang berhasil. Ditegaskan bahwa jika guru merasakan suasana kerja yang kondusif di sekolahnya, maka dapat diharapkan siswanya akan mencapai prestasi akademik yang memuaskan. Kekondusifan iklim suatu sekolah mempengaruhi sikap dan tindakan seluruh komunitas sekolah tersebut, khususnya pada pencapaian prestasi akademik siswa.

Pembentukan suasana pembelajaran yang kondusif perlu diciptakan dalam seluruh lingkungan sekolah termasuk didalamnya lingkungan kelas. Secara eksplisit faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan proses pembelajaran di dalam kelas antara lain adalah kompetensi guru, metode pembelajaran yang dipakai, kurikulum, sarana dan prasarana, serta lingkungan pembelajaran baik lingkungan alam, psikososial dan budaya (Depdikbud, 1994). Dapat diartikan disini bahwa lingkungan sosial pembelajaran di kelas maupun di sekolah (kantor guru dan staf tata usaha) mempunyai pengaruh baik langsung maupun tak langsung terhadap proses kegiatan pembelajaran. Dalam sekolah efektif, perhatian khusus diberikan kepada penciptaan dan pemeliharaan iklim yang kondusif untuk belajar. Iklim yang kondusif ditandai dengan terciptanya lingkungan belajar yang aman, tertib, dan nyaman sehingga proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan baik.

Iklim adalah konsep sistem yang mencerminkan keseluruhan gaya hidup suatu organisasi. Apabila gaya hidup itu dapat ditingkatkan,

kemungkinan besar tercapai peningkatan prestasi kerja (Davis dan Newstrom, 1995:14). Cohen et.al. (2009:11) menjelaskan, selama tiga dekade terakhir telah terjadi pertumbuhan penelitian yang luar biasa yang membuktikan pentingnya iklim sekolah. Penelitian membuktikan bahwa iklim sekolah yang kondusif berdampak langsung terhadap keberhasilan sekolah seperti siswa putus sekolah rendah, tingkat kekerasan menurun, dan prestasi siswa meningkat.

5. Iklim Kebinekaan

Iklim kebinekaan yang baik mencerminkan penerimaan dan dukungan terhadap hak-hak semua warga sekolah, terlepas dari latar belakang gender, sosial-ekonomi, budaya, politik, agama, maupun kondisi fisik. Rasa diterima dan didukung tanpa diskriminasi ini menjadi prakondisi bagi pembelajaran yang berkualitas. Iklim kebinekaan yang baik mencerminkan penerimaan dan dukungan terhadap hak-hak semua warga sekolah, terlepas dari latar belakang gender, sosial-ekonomi, budaya, politik, agama, maupun kondisi fisik. Rasa diterima dan didukung tanpa diskriminasi ini menjadi prakondisi bagi pembelajaran yang berkualitas.

6. Iklim Inklusivitas

Satuan pendidikan harus mampu mengedukasi pengetahuan, menerima, dan juga mendukung para peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus, serta murid cerdas istimewa ataupun bakat istimewa.

Dimensi lain dari keragaman adalah perbedaan individual murid dalam kondisi fisik dan psikologisnya. Satuan pendidikan yang inklusif merupakan satuan pendidikan yang menyediakan layanan pendidikan yang memungkinkan semua peserta didik terlepas dari kondisi fisik dan psikologisnya untuk berpartisipasi dalam proses pembelajaran.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Rapor Pendidikan yang telah diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan Perencanaan berbasis data (PBD) yang dilaksanakan oleh pemangku kebijakan pada Pemerintah Daerah. Untuk percepatan transformasi pendidikan.

B. Saran

Sebaiknya ada keselarasan program antara pusat dan daerah agar percepatan transformasi pendidikan segera terwujud. Dengan tahapan IRB yakni Identifikasi, Refleksi dan Benahi dengan basis data Rapor Pendidikan akan mempermudah pembagian peran demi terwujudnya pendidikan yang bermutu.

DAFTAR PUSTAKA

- Felicia, Nisa, et, al . Naskah Akademik Profil Pelajar Pancasila. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Dan Perbukuan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2016. Gerakan Literasi Nasional Materi Pendukung Literasi Numerasi. Jakarta: Tim Gerakan Literasi Nasional.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2018. Literasi Numerasi: Konsep, Pengembangan, dan Praktik di Masyarakat. Jakarta: Tim Gerakan Literasi Masyarakat
- Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. 2018. Seri Manual GLS Literasi Numerasi dalam Pengembangan Klub Steam dan Wirausaha di Sekolah. Jakarta: Fariani Fianto.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.
- Zuchron, D. Tunas Pancasila. Direktorat Sekolah Dasar, Jakarta: Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas dan Dikmen Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, 2021.